

Implementasi Strategi Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat

Muharis¹, Muhamad Alam Setiawan², Syamsurrijal³
^{1,2,3} Universitas Bumigora

¹²³ Pariwisata, Fakultas Ilmu Humaniora Hukum & Pariwisata, Universitas Bumigora
email: muharis@universitasbumigora.ac.id¹, alam.setiawan@universitasbumigora.ac.id²
syamsurrijal@universitasbumigora.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengulas pentingnya kerjasama dan penerapan strategi Pentahelix dalam pengembangan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama efektif antara pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah merumuskan kebijakan dan regulasi, industri mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan, akademisi menyediakan penelitian, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Kerjasama ini memungkinkan pengembangan wisata yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata.

Kata kunci: *pentahelix, strategi pentahelix, kawasan wisata Senggigi*

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan pariwisata memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kawasan wisata dengan berbagai objeknya (daya Tarik) menjadi sumber pendapatan yang substansial bagi banyak negara dan wilayah di seluruh dunia. Pada prinsipnya, semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar devisa yang diperoleh suatu negara (Rani, 2023). Hal ini berimplikasi bahwa industri tanpa cerobong asap ini sangat diprioritaskan sebagai instrumen untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya dan menunjukkan posisinya di dalam pengembangan perekonomian suatu Kawasan wisata. Sesuai dengan sifatnya “efek pengganda” bahwa pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata melibatkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga makanan dan minuman, serta kerajinan lokal dan layanan tur. Sehingga keberadaan suatu objek wisata memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal, dengan memberikan kontribusi yang besar terhadap penghasilan penduduk setempat (Lagarensse et al., 2022). Lebih lanjut, perkembangan pariwisata juga berimplikasi terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, yang pada akhirnya membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun demikian, pengembangan kawasan wisata juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satu tantangan utamanya adalah pengelolaan yang tidak memadai. Kurangnya strategi pengelolaan yang berkelanjutan dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat.

Salah satu dampaknya yang sering terjadi adalah degradasi lingkungan akibat pengembangan pariwisata yang tidak terkendali. Pembangunan infrastruktur seperti hotel, resor, dan jalan raya seringkali menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami, termasuk habitat satwa liar dan tanah. Peningkatan jumlah pengunjung juga meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam, seperti air bersih dan udara bersih.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan potensi kehilangan kebudayaan lokal. Ketika destinasi wisata diubah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, aspek-aspek budaya autentik sering kali tergerus. Bisnis besar dan rantai hotel internasional dapat menggeser bisnis lokal, yang mengakibatkan hilangnya warisan budaya dan identitas komunitas.

Tidak hanya itu, pertumbuhan pariwisata yang tidak seimbang juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Peningkatan harga properti dan biaya hidup sering kali membuat masyarakat lokal terpinggirkan dari manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata. Pekerjaan di sektor pariwisata juga cenderung tidak stabil dan berbayar rendah, yang memperkuat polarisasi sosial di antara penduduk setempat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat serta lingkungan, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Langkah tersebut terkonfirmasi dalam temuan ((Vani et al., 2020; Khusniyah, 2020; Septadiani et al., 2022) bahwa potensi wisata di suatu kawasan dapat berkembang dengan pesat apabila seluruh *stakeholder* berkolaborasi dengan baik dilihat dari korelasi antar unsur model pentahelix bahkan model ini bisa mensinergikan berbagai macam kekuatan (Darmawan, 2020).

Peran *stakeholders* tercermin dalam peran *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator (Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, 2020). Artinya peran *stakeholders* tercermin dalam berbagai peran yang mereka mainkan dalam proses kebijakan. Sebagai *policy creator*, mereka berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Sebagai koordinator, mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai fasilitator, mereka memfasilitasi komunikasi dan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai

implementor, mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik melalui sumber daya, pengetahuan, atau akses yang mereka miliki. Terakhir, sebagai akselerator, mereka berusaha untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa dampaknya dirasakan secara positif secepat mungkin.

Adapun penelitian sebelumnya, (Fithriyah, 2022) serta (Ishak & Sholehah, 2021) menekankan pentingnya kolaborasi sinergis antar aktor pentahelix. (Sucahyo, 2023) menyoroti pentingnya peran stakeholders dan risiko kegagalan jika salah satu komponen tidak berfungsi. (Huda, S., Wardaya, W., & Anitasari, 2022) menghubungkan peran aktor pentahelix dengan peluang kemajuan desa wisata. Sementara penelitian ini secara spesifik mengulas peran masing-masing aktor pentahelix dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan kerjasama efektif untuk pengembangan kawasan wisata tertentu, yaitu Senggigi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran masing-masing aktor dalam model Pentahelix - pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media—dalam pembangunan berkelanjutan kawasan wisata.

2. Metode Penelitian

Dasar artikel ini bersumber dari studi literatur, yang melibatkan penelusuran jurnal internasional dan nasional, literatur-literatur yang telah dipublikasikan, serta berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup pembahasan dan penjelasan mengenai kondisi dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, analisis tersebut dilakukan secara logis, sistematis, dan konsisten dengan menyelidiki masalah secara rinci dan mendalam.

Proses studi literatur merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun artikel ini. Melalui penelusuran jurnal internasional dan nasional, serta literatur-literatur terkait, penulis mendapatkan landasan yang kokoh untuk mengembangkan argumen dan temuan yang disajikan dalam artikel. Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, artikel ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif kualitatif (Wardiyanta, 2017). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara rinci kondisi dan permasalahan yang ada dalam konteks pengembangan kawasan wisata. Melalui pembahasan yang terperinci, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca tentang berbagai aspek yang terkait dengan topik tersebut.

Selanjutnya, analisis dilakukan secara logis, sistematis, dan konsisten. Penulis menyusun argumen-argumen berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Setiap klaim yang diajukan didukung oleh bukti-bukti yang relevan, sehingga memperkuat keabsahan temuan yang disajikan. Dengan pendekatan yang teliti dan terstruktur, artikel ini memastikan

bahwa pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan jelas dan memahami argumen-argumen yang diajukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun internasional. Kajian oleh (Ramadhan, 2015) memperlihatkan bahwa daya tarik kawasan wisata Senggigi terletak pada beragamnya objek wisata yang tersedia di sana, termasuk Pantai Senggigi, makam Batulayar, Pura Batu Bolong, vila dan berbagai akomodasi seperti hotel, serta beragam pilihan tempat makan dan minum seperti kafe dan restoran. Selain itu, terdapat juga pantai-pantai lain seperti Pantai Loco, Pantai Meninting, dan Pantai Kerandangan, serta berbagai destinasi wisata religi dan budaya. Tak ketinggalan, kawasan ini juga sering menjadi tuan rumah event-event musik seperti Senggigi Jazz Sensation dan lain sebagainya. Namun, pengembangan kawasan ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi strategi Pentahelix dalam pengembangan berkelanjutan kawasan wisata Senggigi, serta dan cara memanfaatkan korelasi antar unsur model Pentahelix untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan kawasan tersebut.

3.1. Implementasi Strategi Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Wisata Senggigi di Lombok Barat

Implementasi strategi Pentahelix dalam pengembangan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Model Pentahelix mencakup lima sektor utama yang saling terkait, yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media. Setiap sektor memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung pembangunan kawasan wisata yang berkelanjutan. Pemerintah setempat, misalnya, bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sementara industri pariwisata perlu berperan dalam pengembangan infrastruktur dan layanan yang ramah lingkungan. Akademisi dapat memberikan pengetahuan dan riset untuk mendukung inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan, sementara masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga kelestarian lingkungan. Peran media juga penting dalam menyebarkan informasi tentang potensi dan kegiatan yang dilakukan di kawasan wisata Senggigi.

Peran pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata pantai Senggigi adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata, sementara yang mempengaruhi

pengelolaan objek wisata adalah faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata, sedangkan faktor penghambat adalah hujan dan sampah (Ferdian, 2022).

Suatu studi menyatakan bahwa pembangunan pariwisata di Kawasan Senggigi melalui pendekatan kolaboratif belum mencapai hasil yang diharapkan secara keseluruhan. Ini terlihat dari beberapa faktor, termasuk kelemahan struktur jaringan yang ditandai dengan minimnya keterlibatan aktor-aktor terkait. Komitmen terhadap tujuan juga masih belum optimal, karena belum ada kesepakatan mengenai tujuan bersama dan misi umum. Tingkat kepercayaan antar pihak terlibat juga masih rendah, dengan kepercayaan yang kuat hanya terjalin di antara instansi pemerintah. Meskipun Dinas Pariwisata terbuka terhadap kolaborasi dan memahami kinerja aktor lainnya, pembagian informasi masih terbatas pada mereka yang tergabung dalam pemerintah. Selain itu, akses terhadap sumber daya masih belum optimal, terutama terlihat dari kurangnya infrastruktur yang memadai meskipun kemajuan dalam pengembangan SDM sudah terlihat (Rahman, A. F. B., & Zitri, 2023).

Temuan tersebut dapat digolongkan ke dalam peran "pemerintah" dalam upaya pengembangan pariwisata. Hal ini karena temuan tersebut menyoroti permasalahan terkait dengan struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, tingkat kepercayaan, pembagian informasi, dan akses terhadap sumber daya yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pembangunan pariwisata.

Sebagai contoh, pemerintah memiliki peran dalam membangun struktur jaringan yang kuat dan memfasilitasi keterlibatan berbagai aktor terkait dalam pengembangan pariwisata. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan adanya kesepakatan mengenai tujuan bersama dan misi umum dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, pemerintah perlu membangun tingkat kepercayaan yang tinggi di antara berbagai pihak terlibat, serta memastikan bahwa informasi terkait dengan pembangunan pariwisata dapat diakses secara luas oleh semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur dan SDM, untuk mendukung pembangunan pariwisata secara efektif.

Posisinya yang strategis di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat membuat Senggigi menjadi tempat yang sangat menguntungkan untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Lokasinya sebagai pintu gerbang menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berada di antara destinasi wisata populer seperti Pulau Bali di sebelah barat, Taman Komodo di sebelah timur, dan Tanah Toraja di Sulawesi Selatan di sebelah selatan, menambah nilai pentingnya sebagai tujuan wisata. Penelitian perencanaan taman wisata, Butterfly Park, di pantai Senggigi, Lombok, direncanakan sebagai tempat untuk pendidikan dan rekreasi. Kawasan pantai Senggigi sudah mendapat reputasi internasional karena keindahan alamnya,

termasuk pantai, taman laut, dan sering menjadi tuan rumah event budaya. Pariwisata saat ini menjadi kebutuhan hiburan yang penting bagi manusia setelah beraktivitas, namun bukan sekadar hiburan semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan yang memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjungnya. Indonesia, sebagai negara tropis dengan curah hujan yang tinggi, memiliki keanekaragaman serangga yang melimpah. Kupu-kupu, sebagai bagian dari keanekaragaman ini, dianggap sebagai anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan untuk membangun Butterfly Park yang dilengkapi dengan fasilitas seperti insectariums, taman terbuka, dan movie theater untuk memvisualisasikan kehidupan kupu-kupu, serta area pengembangbiakan ulat sutra dan fasilitas lainnya. Ini akan mendukung lebih lanjut dalam aspek wisata dan pendidikan. Rencana pembangunan taman wisata Butterfly Park ini bertujuan sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Sebuah Butterfly Park yang sungguh memperhatikan tujuan pokoknya tidak hanya memiliki ruang pameran, tetapi juga ruang lain yang mendukung kehidupan kupu-kupu sebagai sarana rekreasi dan Pendidikan (Fibrianti, 2017).

Temuan tersebut mengungkap peran aktor pentahelix dalam upaya pengembangan pariwisata, terutama dalam hal peran akademisi. Penjelasan tentang keanekaragaman serangga, khususnya kupu-kupu, serta pentingnya memanfaatkan dan melestarikan anugerah alam tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya aspek edukasi dan konservasi dalam pengembangan pariwisata.

Selain itu, kajian perencanaan taman wisata Butterfly Park sebagai wadah pendidikan dan rekreasi, serta menyediakan fasilitas seperti insectariums, taman terbuka, dan movie theater untuk memvisualisasikan kehidupan kupu-kupu, menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan aspek pendidikan dan rekreasi dalam pengembangan destinasi pariwisata. Ini sejalan dengan peran akademisi dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan tempat wisata yang berkelanjutan dan edukatif.

Menurut peringkat Global Master Card-Crescent pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi keenam sebagai destinasi wisata syari'ah di dunia. Wisata syari'ah mengutamakan prinsip-prinsip Islami dalam setiap aspek aktivitasnya. Di Lombok, pada tahun 2015, pariwisata berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia dan Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia. Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa Lombok berhasil meraih penghargaan ini karena menarik minat wisatawan dari Timur Tengah dan negara-negara dengan iklim empat musim yang menyukai destinasi tropis. Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid yang memudahkan wisatawan muslim untuk berwisata sekaligus beribadah. Di Lombok, terdapat penginapan yang ramah terhadap muslim atau Halal Ready yang menyediakan fasilitas seperti penunjuk

arah kiblat, alat solat, dan Al-Qur'an di dalam kamar hotelnya. Gubernur NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, yang juga seorang ulama muda, melihat kemenangan Lombok sebagai peluang untuk mengembangkan pariwisata syari'ah di kawasan tersebut, dan ia menetapkan pantai Senggigi sebagai lokasi utama. Pantai Senggigi memiliki daya tarik utama karena pemandangan matahari terbenamnya yang spektakuler dan sudah dikenal oleh banyak orang sebagai tempat wisata. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata syari'ah di pantai Senggigi dihambat oleh keberadaan banyak diskotik dan klub malam di sekitarnya. Analisis SWOT menunjukkan bahwa pantai Senggigi berada di Kuadran I dan membutuhkan pendekatan yang agresif dalam pengembangannya, yang berarti pengembangan wisata syari'ah harus dilakukan secara cepat dan praktis (Fibrianti, 2017).

Temuan tersebut dapat digolongkan ke dalam peran aktor pentahelix dalam upaya pengembangan pariwisata, khususnya peran pemerintah dan industry (bisnis). Pemerintah: Gubernur NTB, Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi, terlibat dalam mengidentifikasi potensi pariwisata syari'ah di kawasan tersebut dan menetapkan pantai Senggigi sebagai lokasi utama pengembangan. Dia memainkan peran penting dalam menetapkan arah strategis dan kebijakan untuk mengembangkan segmen pariwisata ini. Industri (bisnis): Industri pariwisata di Lombok, terutama pengelola hotel dan akomodasi, berperan dalam mempersiapkan infrastruktur yang ramah terhadap wisatawan muslim atau Halal Ready. Mereka menyediakan fasilitas seperti penunjuk arah kiblat, alat solat, dan Al-Qur'an di dalam kamar hotel, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan syari'ah.

Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai pemimpin strategis yang menetapkan visi dan arah pengembangan pariwisata syari'ah, sedangkan industri berperan dalam implementasi kebijakan tersebut melalui penyediaan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami bagi wisatawan muslim.

Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid, resmi menetapkan 22 anggota Dewan Pengawas dan Pengelola Destination Management Organization (DMO) Kawasan Khusus Senggigi 2023 pada hari Kamis. Tujuan dibentuknya Dewan ini adalah untuk membantu koordinasi, komunikasi, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan kawasan wisata Senggigi. Fauzan berharap keberadaan DMO ini dapat mempercepat pembangunan pariwisata di kawasan tersebut. DMO Senggigi dianggap mirip dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), namun bersifat lokal dan lebih mempertimbangkan hal-hal yang bersifat lokal di kawasan wisata tertentu. Anggota DMO terdiri dari berbagai pihak yang berpengalaman dalam industri pariwisata di Senggigi, seperti pemilik hotel, cafe, restoran, pelaku usaha perjalanan pariwisata, dan akademisi. Direktur Utama DMO Senggigi 2023, Awanadhi Aswinabawa, menyatakan bahwa DMO akan

berupaya menyinkronkan semua pihak untuk mengembangkan kawasan wisata Senggigi secara seimbang dan berkelanjutan. Fokus utama DMO adalah konektivitas, promosi, pemasaran, dan kebersihan di kawasan wisata Senggigi. Upaya konkret termasuk peningkatan infrastruktur dermaga untuk kapal cepat dari Bali ke Senggigi dan melakukan promosi melalui fam-trip dengan komunitas biro perjalanan wisata di Bali (Awaludin, 2023).

3.2. Keterkaitan antar Unsur Model Pentahelix dalam Pengembangan Kawasan Wisata Senggigi di Lombok Barat

Korelasi antar unsur model Pentahelix dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat. Pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan industri pariwisata untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sementara akademisi dapat memberikan pengetahuan dan riset untuk memandu kebijakan tersebut. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, konflik kepentingan dapat diminimalisir, dan dukungan untuk proyek-proyek pembangunan dapat ditingkatkan. Media juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kolaborasi dan menyebarkan informasi tentang upaya-upaya pembangunan berkelanjutan di kawasan Senggigi.

Sport tourism merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata secara menyeluruh, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah pariwisata. Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia dan menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah pengunjung industri pariwisata. Dalam konteks ini, kondisi sport tourism di Pantai Senggigi masih belum stabil, sehingga peneliti tertarik untuk menginvestigasi kesiapan Pantai Senggigi dalam menghadapi era baru yang disebut kenormalan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dan kelemahan menghasilkan sumbu X sebesar 1,05, sedangkan sumbu Y yang berasal dari peluang dan ancaman sebesar 1,18. Dengan demikian, hal ini menghasilkan kuadran I yang menunjukkan bahwa kesiapan sport tourism di Pantai Senggigi memiliki potensi yang kuat dalam mengantisipasi ancaman eksternal dengan menerapkan strategi progresif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi progresif yang direkomendasikan antara lain: (1) Pendirian pusat komando penanggulangan COVID-19 untuk mengendalikan penyebaran virus, (2) Pemberian sertifikat CHSE kepada industri pariwisata untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan akan keamanan daerah tersebut dari COVID-19, dan (3) Pemberian insentif keuangan kepada industri pariwisata

untuk membantu pemulihan potensi pariwisata di daerah Senggigi (Saputra, S. Y., Hidayatullah, M. R., & Isnaini, 2023).

Temuan tersebut dapat digolongkan ke dalam peran aktor pentahelix dalam upaya pengembangan pariwisata, terutama dalam konteks sport tourism di Pantai Senggigi. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungannya dengan aktor-aktor pentahelix:

Pemerintah: Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan regulasi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, termasuk dalam hal ini adalah penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah juga dapat memberikan insentif keuangan kepada industri pariwisata untuk membantu pemulihan potensi pariwisata di daerah Senggigi.

Industri: Industri pariwisata, khususnya dalam hal ini adalah sport tourism di Pantai Senggigi, perlu beradaptasi dengan kondisi baru yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Mereka dapat menerapkan strategi progresif yang direkomendasikan, seperti mendapatkan sertifikat CHSE untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan akan keamanan daerah tersebut dari COVID-19.

Akademisi: Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pengembangan sport tourism di Pantai Senggigi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang efektif.

Dengan memanfaatkan korelasi antar unsur model Pentahelix, kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan dapat terwujud, dan pembangunan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat dapat berlangsung secara berkelanjutan, dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat lokal dan industri pariwisata.

4. Kesimpulan

Simpulan dari hasil dan pembahasan serta korelasi antar unsur model Pentahelix dalam pengembangan kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat adalah bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan media sangat penting dalam mencapai pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan wisata Senggigi memiliki potensi besar sebagai daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun internasional, namun menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, sementara industri pariwisata perlu berperan dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan yang ramah lingkungan. Akademisi dapat

memberikan pengetahuan dan riset untuk mendukung inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan, sementara masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga kelestarian lingkungan. Peran media juga penting dalam menyebarkan informasi tentang potensi dan kegiatan yang dilakukan di kawasan wisata Senggigi.

Daftar Pustaka

- Awaludin. (2023). Bupati Lombok Barat kukuhkan DMO Kawasan Wisata Senggigi. *Antara*.
- Darmawan, A. (2020). Kebangkitan Ekonomi Bangka Belitung Era Covid-19 Tahun 2020. *LPPM Unila*, 1–186.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Indonesia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 menjadi Pengembangan Destinasi Pariwisata mengenai sarana dan parasarana pe. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 08(02), 132–153.
- Ferdian, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Senggigi di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Doctoral Dissertation, UIN Mataram*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Fibrianti, B. S. (2017). Kajian Perencanaan Taman Wisata Dengan Konsep Transformasi Bentuk Di Kawasan Wisata Senggigi Lombok Barat. 3(1), 2588–2593.
- Fithriyah, M. U. (2022). Pengembangan Wisata Halal Dengan Model Pentahelix. *Jurnal EL-RIYASAH*, 13(2), 85. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321>
- Huda, S., Wardaya, W., & Anitasari, D. (2022). Pengembangan Sadar Wisata Melalui Strategi Pentahelix Bagi Masyarakat Desa Wonosalam ., *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 161–172.
- Ishak, P., & Sholehah, N. L. H. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 207. <https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1726>
- Khusniyah. (2020). Implementasi Model Pentahelix Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kediri (Studi Literatur). *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan I Tahun 2020*, 159–163.
- Lagarensen, B. E. S., Adrah, M., & Saelangi, F. (2022). Pengaruh Objek Wisata Sumaru Endo Terhadap Sumber Pendapatan Masyarakat di Desa Leleko Kecamatan Romboken Kabupaten Minahasa. *Ilmu Pariwisata*, 139–143.
- Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144–159. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.919>
- Ramadhan, M. S. (2015). *Ramadhan, M. S. (2015). Pengembangan Kawasan Wisata*. 5(2), 61–70. *Pengembangan Kawasan Wisata*. 5(2), 61–70.
- Rani, N. L. M. E. (2023). Fungsi hukum pariwisata dalam perlindungan dan pelestarian obyek

- wisata. *VIDYA WERTTA: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6, 74–90.
- Saputra, S. Y., Hidayatullah, M. R., & Isnaini, L. M. Y. (2023). Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru. In *SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga* (Vol. 4, Issue 1, pp. 7–13). <https://doi.org/10.46838/spr.v4i1.285>
- Septadiani, W. P., Pribadi, I. O. S., & Rosnarti, D. (2022). Peran Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Universitas Trisakti. WIDYA PUTRI SEPTADIANI*, 22–31.
- Sucahyo, I. (2023). Pentahelix Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Gunung Bromo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2), 1125–1133. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4784/http>
- Vani, R. V., Priscilia, S. O., & Adiarto, A. (2020). Model Pentahelix Dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 63–70. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.3361>
- Wardiyanta, M., & Hum, M. (2006). Metode penelitian pariwisata. Yogyakarta, Penerbit Andi, 52.